

GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH

**Achmad Husen, Fauzi Abdillah, Dina Rahma Fadlilah, Rivaldo Sanjaya,
Abraham Erlangga Renaldo
Universitas Negeri Jakarta**

Abstract

Currently, natural phenomena show a decline in quality and even environmental damage. This is a shared responsibility of all parties, namely the government, the business world and the industrial world, and society. Efforts to overcome this can be carried out both preventively (prevention) in the form of: being economical in the utilization and use of natural resources and the environment, being wise in the management of natural resources and being professional in environmental conservation, or repressively (remediation) in the form of: disaster mitigation, providing assistance, and psychological treatment as a result of trauma and giving sanctions to those who damage the environment.

As part of society, schools cannot escape from this responsibility. The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia has long directed and given awards to schools that consistently and continuously make efforts to develop pro-environmental attitudes and behaviors for their citizens, which are named Adiwiyata Schools. In relation to this, it is very necessary and strategic to carry out the Environmental Care and Culture Movement in Schools.

The benefits of this activity are very important in developing a safe and comfortable environment, so that people can live their lives with better quality.

The activity was held on Thursday, July 11, 2024, attended by Supervisors, Principals, and Teachers of Elementary Schools in 4 Makasar District, East Jakarta, a total of 41 people.

Based on monitoring and evaluation of the activities and interviews conducted, participants showed enthusiasm and were very enthusiastic in participating in the activities, and they felt the enormous benefits for the school's efforts in realizing the Adiwiyata School in the future. Therefore, they hope that after this activity there will be a follow-up, either in the form of consultation or other forms of activities.

Keywords: Strengthening, Role of School Residents, Adiwiyata

Abstrak

Saat ini fenomena alam menunjukkan terjadi penurunan kualitas dan bahkan kerusakan lingkungan. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama semua pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan dunia industri serta masyarakat. Upaya penanggulangannya dapat dilakukan baik preventif (pencegahan) berupa: hemat dalam pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan, bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam dan profesional dalam pelestarian lingkungan, maupun represif (penanggulangan) berupa: mitigasi bencana, pemberian bantuan, dan penanganan psikologis sebagai akibat trauma serta pemberian sanksi bagi para perusak lingkungan.

Sebagai bagian dari masyarakat, sekolah dengan demikian tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sudah sejak lama mengarahkan dan memberikan penghargaan kepada sekolah yang secara konsisten dan berkesinambungan melakukan upaya mengembangkan sikap dan perilaku pro-lingkungan kepada warganya, yang diberi nama Sekolah Adiwiyata. Terkait dengan hal ini maka sangat perlu dan strategis bila dilakukan kegiatan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah.

Manfaat dari kegiatan ini sangat penting dalam mengembangkan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara lebih berkualitas.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Hari Kamis, 11 Juli 2024, diikuti oleh Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru-guru Sekolah Dasar Binaan 4 Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, seluruhnya berjumlah 41 orang.

Berdasarkan pantauan dan evaluasi terhadap kegiatan serta wawancara yang dilakukan, peserta menunjukkan antusiasme dan sangat bersemangat dalam mengikuti kegiatan, dan mereka merasakan manfaat yang sangat besar bagi upaya-upaya sekolah dalam mewujudkan Sekolah Adiwiyata pada masa yang akan datang. Oleh karena itu mereka berharap setelah kegiatan ini ada tindaklanjutnya, baik berupa konsultasi maupun bentuk kegiatan lainnya.

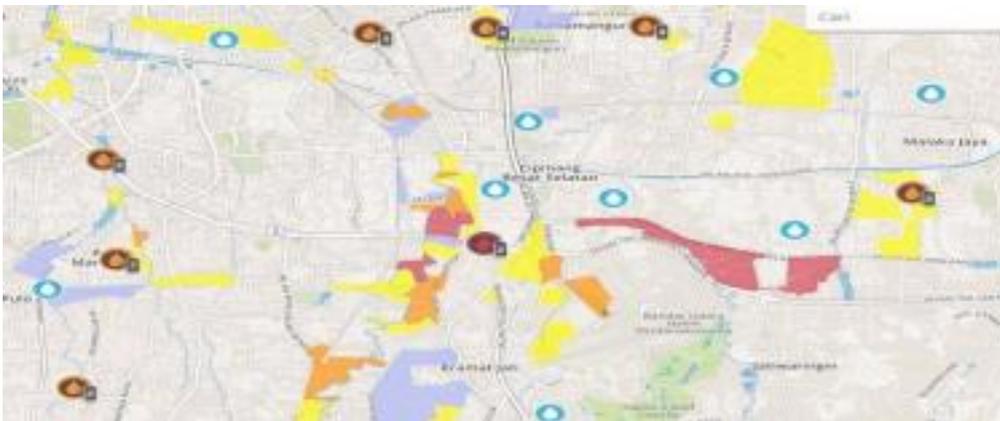
Kata Kunci: Penguatan, Peran Warga Sekolah, Adiwiyata

I. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Musibah yang dialami masyarakat dan bangsa Indonesia belakangan ini cukup masif dan meluas. Gempa, tsunami, banjir, longsor, terjadi begitu sering dan di beberapa wilayah yang cakupannya cukup luas. Kalau dikaji penyebabnya, musibah tersebut selain faktor alamiah, tidak terlepas juga disebabkan faktor kelalaian dan keserakahan manusia. Berdasarkan analisis para ahli hal ini terkait dengan pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang kurang bertanggung jawab, tidak profesional, dan sifat serakah. Kerugian yang ditimbulkannya pun sangat besar, bahkan tidak sedikit nyawa yang melayang.

Awal tahun 2020 saat masyarakat di daerah lain pada umumnya merayakan Tahun Baru dengan suka cita dan penuh kegembiraan, warga DKI Jakarta justru berdukacita karena sebagian wilayahnya terkena musibah banjir.



Persebaran banjir di Jakarta Timur yang dilaporkan warga dalam petabencana.id (sumber: megapolitan.kompas.com)

Begitu luas cakupan wilayah yang terkena banjir dan merata di seluruh wilayah Jakarta, demikian juga ketinggian air sangat bervariasi namun rata-rata cukup tinggi bahkan ada yang mencapai 3 meter. Berdasarkan laporan masyarakat yang disampaikan pada situs petabencana.id, terdapat 97 titik banjir yang terjadi di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

1. Wilayah Jakarta Pusat: terdapat 17 titik banjir;
2. Wilayah Jakarta Utara: terdapat 13 titik banjir;
3. Wilayah Jakarta Timur: terdapat 30 titik banjir;
4. Wilayah Jakarta Selatan: terdapat 20 titik banjir; dan
5. Wilayah Jakarta Barat: terdapat 17 titik banjir.

Banjir ini berimbas pada kegiatan dan sarana prasarana di Jakarta dan sekitarnya. Air menggenang dan mengganggu beroperasinya fasilitas-fasilitas umum seperti moda transportasi seperti KRL, KA Bandara hingga prasarana umum seperti jalan tol.

Keadaan tersebut menyebabkan jumlah masyarakat yang terkena dampak banjir sangat banyak, dan sudah tentu kerugian yang ditimbulkannya pun sangat besar. Kapusdatin BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Agus Wibowo mengatakan banjir di awal tahun 2002 yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya selain menyebabkan kerusakan dan kerugian harta benda juga menimbulkan korban jiwa. Pada hari Rabu (1/1/2020) sampai dengan pukul 17.45 WIB, tercatat 9 korban meninggal dunia karena bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kerugian yang demikian besar sebenarnya bisa dikurangi bila faktor-faktor

penyebab banjir dapat diantisipasi. Bila dikaji secara umum, faktor penyebab terjadinya musibah tersebut selain faktor alamiah, tidak terlepas juga disebabkan faktor kelalaian dan keserakahan manusia. Berdasarkan analisis para ahli hal ini terkait dengan pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang kurang bertanggung jawab, tidak profesional, dan sifat serakah.

Terkait faktor alamiah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sering memberikan informasi dan peringatan dini terkait dengan keadaan cuaca termasuk prakiraan curah hujan di suatu wilayah. Namun informasi dan peringatan dini tersebut terkadang kurang memperoleh respon yang memadai dari masyarakat. Terkait faktor lain, Pramono (Ahli Hidrologi dan Dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada/UGM) mengungkapkan adanya sejumlah faktor yang turut mempengaruhi banjir ini. Menurutnya, tata ruang yang belum mengacu pada risiko banjir turut berperan dalam banjir Jakarta ini. "Tata ruang (terutama RDTR) belum mengacu pada risiko banjir," katanya lagi. Selain faktor hujan, infrastruktur wilayah, topografi, **drainase** juga dinilai mempengaruhi potensi banjir tidaknya suatu wilayah.

Pada sisi lain, sikap dan perilaku masyarakat juga menunjukkan kurang peduli terhadap lingkungan dan bahkan merusak lingkungan. Hal ini terlihat dari begitu banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, bukan saja sampah dapur tetapi juga kaleng, plastik dengan berbagai ukuran bahkan mebeller yang tidak lagi terpakai. Kondisi ini diperparah dengan enggan masyarakat untuk secara rutin membersihkan saluran air (drainase) dari sampah, sehingga saat hujan turun, air tidak mengalir secara normal bahkan tersendat, dan banjir pun tidak dapat dihindarkan.

Upaya-upaya penanganan banjir sebenarnya telah banyak dilakukan namun terkesan inisiasi dan pelaksanaannya lebih didominasi oleh pihak pemerintah, sehingga masyarakat cenderung bersifat pasif dan lebih sering menampilkan sikap menunggu. Padahal disadari bahwa masalah lingkungan khususnya banjir merupakan tanggung jawab bersama semua elemen bangsa. Oleh karena itu semua pihak seharusnya turut bertanggung jawab dan berkontribusi dalam upaya penyelesaian masalah tersebut sesuai dengan kedudukan, tugas dan kemampuan masing-masing, termasuk di dalamnya warga masyarakat.

Sebagai bagian dari masyarakat, sekolah dengan demikian tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Bagi sekolah, tanggung jawab untuk ikut terlibat dan berkontribusi dalam menanggulangi masalah yang ada di lingkungan sekitar bukan hal baru. Apalagi yang terkait dengan permasalahan lingkungan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sudah sejak lama mengarahkan dan memberikan penghargaan kepada sekolah yang secara konsisten dan berkesinambungan melakukan upaya menumbuhkembangkan sikap dan perilaku pro-lingkungan kepada para siswanya, melalui program dan kegiatan terpadu dalam menjaga dan merawat lingkungan. Program dan kegiatan terpadu dimaksud meliputi intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Penghargaan tersebut diberi nama Sekolah Adiwiyata.

Berdasarkan pemikiran di atas maka kegiatan pengabdian masyarakat ini berjudul Penguatan Peran Warga Sekolah Dalam Mendukung Sekolah Adiwiyata di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

1.2 Permasalahan Mitra

Sebagaimana diungkap di atas, Wilayah Jakarta Timur merupakan wilayah yang banyak terdapat titik banjir saat melanda DKI Jakarta di tahun 2020 lalu. Terpici oleh terpaan banjir yang melanda sekolah, ditambah adanya motivasi untuk dapat meraih predikat sekolah adiwiyata, pimpinan sekolah (Kepala Sekolah dan para

wakilnya) bertekad melakukan upaya penanganan permasalahan tersebut sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan asri. Didukung oleh pembimbing kegiatan kesiswaan serta guru guru, tercetuslah gagasan untuk mengadakan kegiatan yang dapat menumbuhkembangkan sikap, perilaku dan kebiasaan pro-lingkungan warga sekolah.

Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang akan ditangani melalui kegiatan pengabdian masyarakat adalah: "Upaya apakah yang dapat dilakukan dalam mendukung Sekolah meraih predikat Adiwiyata di Kecamatan Makasar khususnya di dunia persekolahan?"

II. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 Solusi

Sesuai dengan permasalahan mitra sebagaimana dikemukakan di atas, maka solusi yang ditawarkan melalui kegiatan pengabdian ini adalah Penguatan Peran Warga Sekolah dalam Mendukung Sekolah Adiwiyata di DKI Jakarta khususnya di Kecamatan Makasar Jakarta Timur.

2.1.1 Konsep Sekolah Adiwiyata

2.1.1.1 Pengertian Adiwiyata

Kata Adiwiyata berasal dari bahasa Sanskerta "Adi" dan "Wiyata". Adi mempunyai makna besar, agung, baik, ideal atau sempurna. Wiyata mempunyai makna tempat dimana seseorang mendapat ilmu pengetahuan, norma dan etika dalam berkehidupan sosial. Jadi, adiwiyata mempunyai pengertian atau makna tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Memahami makna sekolah berwawasan lingkungan yang seharusnya adalah berbuat untuk menciptakan kualitas lingkungan sekolah yang kondusif, ekologis, lestari secara nyata dan berkelanjutan, tentunya dengan cara-cara yang simpatik, kreatif, inovatif dengan menganut nilai-nilai dan kearifan budaya lokal (Dwipasari, 2016). Program Adiwiyata adalah program yang komprehensif melibatkan semua stakeholders baik di sekolah dan masyarakat untuk membantu meningkatkan kepedulian lingkungan, khususnya para siswa. Program Adiwiyata dapat dilaksanakan secara optimal sejak tahun 2010 seiring dengan adanya kebijakan baru yang menggantikan kebijakan sebelumnya antara Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional melalui kesepakatan bersama No. 03/MenLH/02/2010. Hal ini kemudian dikuatkan lagi dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Iswari & Utomo, 2017). Program Adiwiyata dapat diikuti oleh Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang berstatus negeri atau swasta serta telah terakreditasi (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata) .

2.1.1.2 Tujuan Program Adiwiyata

Tujuan program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan

berkelanjutan (Silaban, 2017). Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata tujuan program Adiwiyata adalah mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, pelaksanaannya berdasarkan tiga prinsip yaitu edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Menurut Permen Adiwiyata Nomor 5 Tahun 2013 tujuan program yang hendak dicapai dijabarkan dalam empat komponen utama, yaitu:

- a. Aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan;
- b. Aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan;
- c. Aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif; dan
- d. Aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan.

Komponen a dan b merupakan kewenangan dan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedangkan komponen c dan d merupakan kewenangan dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (Iswari & Utomo, 2017).

2.1.1.3 Dasar Hukum Program Adiwiyata

Implementasi Program Adiwiyata diatur dalam Kesepakatan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional No. 03/MenLH/02/2010 yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata.

2.1.1.4. Tingkatan Sekolah Adiwiyata

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan adiwiyata, sekolah adiwiyata memiliki empat tingkatan yaitu sekolah adiwiyata tingkat kabupaten/kota yaitu sekolah yang sudah menerapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup minimal selama dua belas bulan, sekolah adiwiyata tingkat provinsi yaitu sekolah yang sudah menerapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup minimal selama 24 bulan yang terhitung sejak dua belas bulan setelah menerima penghargaan sekolah adiwiyata kabupaten/kota, sekolah adiwiyata tingkat nasional sekolah yang sudah menerapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup minimal selama dua belas bulan yang terhitung sejak dua belas bulan setelah menerima penghargaan sekolah adiwiyata provinsi yaitu dan sekolah adiwiyata mandiri yaitu sekolah yang sudah menerapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup minimal selama dua belas bulan yang terhitung sejak dua belas bulan setelah menerima penghargaan sekolah adiwiyata nasional serta berhasil membina paling sedikit dua sekolah.

2.1.1.5 Syarat Pengusulan Sekolah Adiwiyata

Program adiwiyata bukanlah sebuah perlombaan akan tetapi penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah selama kurun waktu tertentu. Setiap sekolah dapat diusulkan menjadi sekolah adiwiyata dengan memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Berikut adalah syarat-syarat pengusulan sekolah adiwiyata sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata:

- a. Sekolah yang akan diusulkan menjadi sekolah adiwiyata harus membuat Rancangan Pelaksanaan Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah
- b. Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah yang sudah dirancang kemudian dilaksanakan selama kurun waktu tertentu:
 - 1) Bagi sekolah yang akan diusulkan menjadi sekolah adiwiyata kabupaten/kota setidaknya sudah melaksanakan Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah selama dua belas bulan terhitung setelah Rencana Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah disahkan.
 - 2) Bagi sekolah yang kewenangan penyelenggaraan pengelolaan pendidikannya di Provinsi dan akan diusulkan menjadi sekolah adiwiyata provinsi setidaknya sudah melaksanakan Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah selama 24 bulan serta mengirimkan usulan pencalonan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup provinsi.
 - 3) Bagi sekolah yang kewenangan penyelenggaraan pengelolaan pendidikannya di Kabupaten/kota dan akan diusulkan menjadi sekolah adiwiyata provinsi setidaknya sudah melaksanakan Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) selama dua belas bulan terhitung setelah mendapat penghargaan sekolah adiwiyata Kabupaten/kota serta mengirimkan usulan pencalonan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi
 - 4) Bagi sekolah yang akan diusulkan menjadi sekolah adiwiyata nasional setidaknya sudah melaksanakan Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah selama dua belas bulan setelah mendapat penghargaan sekolah adiwiyata provinsi serta menerima usulan pencalonan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi kepada kepala badan
 - 5) Bagi sekolah yang akan diusulkan menjadi sekolah adiwiyata nasional setidaknya sudah melaksanakan Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah selama dua belas bulan setelah mendapat penghargaan sekolah adiwiyata nasional, berhasil membina minimal dua sekolah serta menerima usulan pencalonan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup provinsi kepada kepala badan.
- c. Adanya pemantauan dan evaluasi dari Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah yang dilaksanakan
- d. Syarat Administratif
Syarat administratif terdiri atas dokumen-dokumen yang sudah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dokumen-dokumen yang diperlukan tergantung kepada tingkatan adiwiyata yang akan diusulkan. Berikut adalah syarat-syarat administratif yang diperlukan berdasarkan tingkatan adiwiyata.
 - 1) Berkas yang diperlukan bagi sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya berada di kabupaten/kota dan akan diusulkan menjadi sekolah adiwiyata kabupaten/kota adalah:
 - a) Surat permohonan calon Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota
 - b) Isian kuesioner evaluasi mandiri pelaksanaan Gerakan PBLHS dan bukti pendukung
 - c) Salinan keputusan kepala sekolah tentang pembentukan tim

- Adiwiyata sekolah
- d) Tabel Rencana Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.
- 2) Berkas yang diperlukan bagi sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya berada di Provinsi dan akan diusulkan menjadi sekolah adiwiyata kabupaten/kota adalah:
- Surat permohonan calon Sekolah Adiwiyata provinsi
 - Isian kuesioner evaluasi mandiri pelaksanaan Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan bukti pendukung
 - Salinan keputusan kepala sekolah tentang pembentukan tim Adiwiyata sekolah
 - Tabel Rencana Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.
- 3) Berkas yang diperlukan bagi sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya berada di Provinsi dan akan diusulkan menjadi sekolah adiwiyata provinsi adalah:
- Surat permohonan calon Sekolah Adiwiyata provinsi
 - Berita acara penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata provinsi oleh tim penilai Adiwiyata kabupaten/kota yang dilampiri formulir penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata provinsi dan bukti pendukung
 - Fotokopi keputusan bupati/wali kota tentang penetapan Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota.
- 4) Berkas yang diperlukan bagi sekolah yang kewenangan akan diusulkan menjadi sekolah adiwiyata nasional adalah:
- Surat permohonan calon Sekolah Adiwiyata nasional
 - Berita acara penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyatanasional oleh tim penilai Adiwiyata provinsi yang dilampiri formulir penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata nasional dan bukti pendukung
 - Fotokopi keputusan gubernur tentang penetapan Sekolah Adiwiyata provinsi.
- 5) Berkas yang diperlukan bagi sekolah yang kewenangan akan diusulkan menjadi sekolah adiwiyata mandiri adalah:
- Surat permohonan calon Sekolah Adiwiyata mandiri
 - Berita acara penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyatamandiri oleh tim penilai Adiwiyata provinsi yang dilampiri formulir penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata mandiri dan bukti pendukung
 - Fotokopi keputusan Menteri tentang penetapan Sekolah Adiwiyata nasional
 - Fotokopi keputusan atau daftar sekolah binaan yang ditandatangani oleh kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota atau provinsi
 - Fotokopi keputusan penetapan sekolah binaan sebagai Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota atau Sekolah Adiwiyata provinsi atau Sekolah Adiwiyata nasional
 - Laporan pembinaan calon Sekolah Adiwiyata mandiri terhadap sekolah binaan.

Sekolah yang akan diusulkan menjadi sekolah adiwiyata pertama akan melewati seleksi administratif. Bila berkas yang dikirimkan dinyatakan lengkap maka akan dilakukan penilaian pemenuhan kriteria

sekolah adiwiyata melalui penilaian dokumen dan verifikasi lapangan yang akan dipaparkan pada poin selanjutnya, sedangkan bagi sekolah yang dinyatakan tidak lengkap berkasnya diberikan waktu lima hari kerja untuk melengkapi kekurangannya.

2.1.1.6 Kriteria Penilaian Sekolah Adiwiyata

Sekolah yang lolos seleksi administratif kemudian akan dilakukan penilaian pemenuhan kriteria sekolah adiwiyata yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Penilaian dilakukan dengan cara menilai dokumen-dokumen terkait dan verifikasi lapangan. Untuk lebih detailnya akan disajikan tabel penilaian sekolah adiwiyata:

a. Perencanaan Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah

Kriteria pertama yang dinilai dalam pengusulan sekolah adiwiyata adalah perencanaan Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Sebelum mengusulkan diri sebagai sekolah adiwiyata, setiap sekolah diwajibkan membuat perencanaan gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Poin maksimal yang dapat diperoleh sekolah dari tahap perencanaan ini adalah dua puluh. Berikut hal-hal yang dinilai dalam perencanaan gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah:

- 1) Rencana Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah disusun berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Sekolah dan hasil Identifikasi Potensi dan Masalah Lingkungan Hidup. Laporan Evaluasi Diri Sekolah merupakan suatu dokumen yang berisi hasil proses evaluasi yang bersifat internal dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan sedangkan Identifikasi Potensi dan Masalah Lingkungan Hidup merupakan pemetaan potensi dan masalah lingkungan hidup sekolah dan lokal/daerah dengan memperhatikan isu lingkungan hidup global. Semakin sesuai Rencana Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dengan Laporan Evaluasi Diri Sekolah dan hasil Identifikasi Potensi dan Masalah Lingkungan Hidup maka nilai yang diperoleh juga akan semakin besar
- 2) Penyusunan Rencana Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah melibatkan kepala sekolah, dewan pendidik, komite sekolah, peserta didik, dan masyarakat. Bila penyusunan Rencana Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah melibatkan kelima pihak diatas maka nilai yang diperoleh akan semakin besar
- 3) Rencana Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah terintegrasi dalam Dokumen Satu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bila keseluruhan Dokumen Satu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (visi, misi, tujuan sekolah dan Program Pengembangan Diri) memuat Rencana Gerakan PBLHS nilai yang diperoleh akan semakin besar
- 4) Rencana Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah terintegrasi dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Semakin banyak Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang memuat penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup semakin banyak juga nilai yang dapat diperoleh.

b. Pelaksanaan Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah

Kriteria kedua yang dinilai dalam pengusulan sekolah adiwiyata adalah pelaksanaan Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Rencana Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah yang sudah dibuat kemudian dilaksanakan. Pelaksanaan Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah merupakan bagian terbesar yang dinilai dalam pengusulan sekolah adiwiyata dimana nilai maksimal yang dapat diperoleh dari tahap ini sebanyak enam puluh. Berikut hal-hal yang dinilai dalam pelaksanaan gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah:

- 1) Pembelajaran pada mata pelajaran, ekstrakurikuler dan pembiasaan diri yang mengintegrasikan Penerapan Penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup di Sekolah berupa:
 - a) Kebersihan, fungsi sanitasi, dan drainase
Pada bagian ini ada tiga bagian yang dinilai yaitu: jumlah unsur warga sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase Sekolah, jumlah upaya pemeliharaan kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase Sekolah dan terpeliharanya kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase Sekolah.
 - b) Pengelolaan sampah
Pada bagian ini ada tiga bagian yang dinilai yaitu: jumlah upaya pengurangan timbulan sampah dan penggunaan ulang barang/sampah (Reduce dan Reuse), jumlah upaya daur ulang sampah, pelibatan peserta didik dan Kader Adiwiyata, dalam pemindahan sampah dari sumber ke tempat pengelolaan sampah di Sekolah (bank sampah, tempat pengomposan, dll.) dan persentase pengurangan timbulan sampah melalui 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
 - c) Penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman
Pada bagian ini ada tiga bagian yang dinilai yaitu: kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembibitan pohon/tanaman, jumlah unsur warga Sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembibitan pohon/tanaman dan jumlah pohon/tanaman yang ditanam dan dipelihara.
 - d) Konservasi Air
Pada bagian ini yang dinilai adalah jumlah upaya Konservasi Air.
 - e) Konservasi Energi
Pada bagian ini yang dinilai adalah jumlah upaya Konservasi Energi.
 - f) Inovasi terkait Penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup lainnya berdasarkan hasil Identifikasi Potensi dan Masalah Lingkungan Hidup
Pada bagian ini yang dinilai adalah jumlah karya inovatif pendidik dan peserta didik berkaitan dengan Penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup.
- 2) Penerapan Penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup untuk masyarakat sekitar Sekolah dan/atau di daerah
Pada bagian ini yang dinilai adalah jumlah aksi Penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup untuk masyarakat sekitar Sekolah, kebersihan dan fungsi drainase di lingkungan sekitar Sekolah dan pengelolaan sampah di lingkungan sekitar Sekolah
- 3) Membentuk jejaring kerja dan komunikasi
Pada bagian ini yang dinilai adalah jumlah jejaring kerja dan komunikasi

- (antar warga Sekolah, antar Sekolah dan dengan instansi/ pihak terkait).
- 4) Kampanye dan publikasi Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah
Pada bagian ini yang dinilai adalah jumlah kegiatan kampanye dan publikasi Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan jumlah media publikasi.
 - 5) Membentuk dan memberdayakan Kader Adiwiyata
Pada bagian ini yang dinilai adalah persentase Kader Adiwiyata yang dibentuk dari kalangan peserta didik dan jumlah kegiatan pemberdayaan Kader Adiwiyata.

c. Evaluasi Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah

Evaluasi Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah merupakan bagian ketiga yang dinilai dalam pengusulan sekolah adiwiyata. Poin maksimal yang dapat diperoleh dari tahap ini sebanyak dua puluh. Berikut hal-hal yang dinilai dalam evaluasi gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah:

- 1) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah
Pada bagian ini yang dinilai adalah frekuensi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan prosentase rencana kegiatan Gerakan PBLHS yang terlaksana.
- 2) Pemantauan dan evaluasi melibatkan kepala sekolah, dewan pendidik, komite sekolah, peserta didik, dan masyarakat
Pada bagian ini yang dinilai adalah pemantauan dan evaluasi melibatkan berbagai pihak.

Setelah dilakukan penilaian maka selanjutnya adalah pembuatan keputusan apakah sekolah yang diusulkan sudah memenuhi kriteria sebagai sekolah adiwiyata atau belum. Dalam penentuannya, terdapat nilai minimum yang harus dipenuhi sekolah. Setiap tingkatan sekolah adiwiyata berbeda nilai minimumnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Sekolah yang diusulkan sebagai sekolah adiwiyata Kabupaten/kota paling sedikit memperoleh nilai 70%
- 2) Sekolah yang diusulkan sebagai sekolah adiwiyata Provinsi paling sedikit memperoleh nilai 80%
- 3) Sekolah yang diusulkan sebagai sekolah adiwiyata Nasional paling sedikit memperoleh nilai 90%
- 4) Sekolah yang diusulkan sebagai sekolah adiwiyata Mandiri paling sedikit memperoleh nilai 95%

Status sekolah adiwiyata berlaku selama empat tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan usulan dan hasil evaluasi yang diatur oleh kepala badan.

2.2 Target Luaran

Secara akademik, melalui solusi ini diharapkan warga sekolah terutama warga sekolah memperoleh: 1) pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan; 2) termotivasi untuk bersikap, berperilaku dan membiasakan diri selalu pro-lingkungan; 3) timbulnya kemauan untuk mendukung sekolah dalam melaksanakan Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan (melalui program dan kegiatan terpadu).

Secara administratif, kegiatan ini dapat memperoleh dampak terpublikasinya kegiatan ke khalayak umum, sebab kegiatan ini akan di *publish* di youtube. Selain itu, melalui penyusunan artikel kegiatan ini juga diarahkan untuk diterbitkan pada

jurnal pengabdian, baik Jurnal “Peduli” di Pascasarjana UNJ, maupun Jurnal Sarwahita Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNJ. Kemudian untuk membantu sekolah dalam mengarahkan warganya (khususnya para siswa) membiasakan diri bersikap dan berperilaku pro-lingkungan, akan disusun Buku Panduan.

III. METODE PELAKSANAAN

3.1 Pendekatan dan Metode Pelaksanaan

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah kesetaraan-kemitraan. Pendekatan ini menempatkan peserta pada posisi dan kedudukan yang setara dengan peserta lain dan mengajak kepada peserta untuk menempatkan peserta lain sebagai mitra dalam kegiatan. Sedangkan metode yang diterapkan meliputi: ceramah, tanya jawab, diskusi, dan afirmasi.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Strategi Pelaksanaan Kegiatan

4.1.1 Pengorganisasian

Kegiatan Penguatan Peran Warga Sekolah Dalam Mendukung Sekolah Adiwiyata ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai salah satu wujud dari Tri Darma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh Dosen. Oleh karena itu kegiatan ini dikoordinasikan oleh Dosen, dalam hal ini penulis sendiri dibantu oleh 1 (satu) orang dosen sebagai anggota dan 2 (dua) mahasiswa sebagai fasilitator dan pendukung kegiatan.

4.1.2 Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) hari, yaitu pada Hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, bertempat di Aula SDS Angkasa 9, Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

4.1.3 Narasumber dan Fasilitator

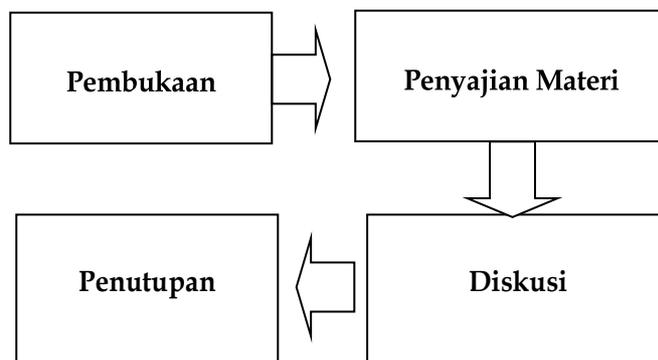
Dalam kegiatan ini yang bertindak sebagai narasumber hanya 1 (satu) orang, yaitu: Prof. Dr. Achmad Husen, M.Pd., pengampu mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FIS UNJ. Sedangkan yang bertindak sebagai fasilitator dan pendukung kegiatan adalah dosen anggota 2 (dua) orang mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.

4.1.4 Peserta

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Sekolah dan Guru-guru Sekolah Dasar Wilayah Binaan 4 Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, baik negeri maupun swasta, yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah masing-masing, dan 1 (satu) orang pengawas, seluruhnya berjumlah 41 orang.

4.1.5 Alur Kegiatan

Alur kegiatan Penguatan Peran Warga Sekolah Dalam Mendukung Sekolah Adiwiyata ini dapat digambarkan sebagai berikut:



4.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut dirangkai dalam suatu susunan acara, selengkapnya sebagai berikut:

- 4.2.1 Pembukaan, diisi dengan: Pengantar, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Sambutan, dan Pembukaan Kegiatan secara Resmi.
- 4.2.2 Penyajian Materi diisi dengan Paparan materi: “Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah”.
- 4.2.3 Diskusi diisi dengan tanya jawab.
- 4.2.4 Penutupan diisi dengan Pembacaan Doa, dilanjutkan dengan Penyerahan Sertifikat secara simbolis dan evaluasi kegiatan.

4.3 Evaluasi Kegiatan

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan keberhasilan dari kegiatan ini, Tim Pelaksana melakukan pengamatan dan penyebaran angket.

Berdasarkan pengamatan, para peserta menunjukkan sikap yang sangat bersemangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh peserta sesuai penyajian materi oleh narasumber. Demikian juga narasumber, melihat bersemangatnya peserta kegiatan, narasumber bersikap sangat responsif dan dengan penuh kesabaran tapi tetap semangat, menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan peserta.

Terkait dengan penyebaran angket yang mengukur kepuasan peserta terhadap kegiatan, Tim Pelaksana menyebarkan kepada 22 orang peserta, setelah datanya ditabulasi menunjukkan hasil sebagai berikut:

No.	Aspek Yang Dievaluasi	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persen
01.	Ketersediaan informasi tentang program sebelum pelaksanaan.	Sangat tidak puas	-	-
		Tidak puas	-	-
		Netral	-	-
		Puas	10	45,45
		Sangat puas	12	54,55
Total			22	100

No.	Aspek Yang Dievaluasi	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persen
02.	Kemudahan dalam proses pendaftaran.	Sangat tidak puas	-	-
		Tidak puas	-	-
		Netral	-	-
		Puas	3	13,64
		Sangat puas	19	86,36
Total			22	100

No.	Aspek Yang Dievaluasi	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persen
03.	Durasi waktu (lamanya) pelaksanaan program.	Sangat tidak puas	-	-
		Tidak puas	-	-
		Netral	1	4,55
		Puas	6	27,27
		Sangat puas	15	68,18
Total			22	100

No.	Aspek Yang Dievaluasi	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persen
04.	Lokasi pelaksanaan program.	Sangat tidak puas	-	-
		Tidak puas	-	-
		Netral	-	-
		Puas	6	27,27
		Sangat puas	16	72,73
Total			22	100

No.	Aspek Yang Dievaluasi	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persen
05.	Fasilitas yang disediakan selama program.	Sangat tidak puas	-	-
		Tidak puas	-	-
		Netral	-	-
		Puas	6	27,27
		Sangat puas	16	72,73
Total			22	100

No.	Aspek Yang Dievaluasi	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persen
06.	Kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta.	Sangat tidak puas	-	-
		Tidak puas	-	-
		Netral	-	-
		Puas	3	13,64
		Sangat puas	19	86,36
Total			22	100

No.	Aspek Yang Dievaluasi	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persen
07.	Kualitas penyampaian materi oleh dosen (instruktur).	Sangat tidak puas	-	-
		Tidak puas	-	-
		Netral	-	-
		Puas	3	13,64
		Sangat puas	19	86,36
Total			22	100

No.	Aspek Yang Dievaluasi	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persen
08.	Interaktifitas dan partisipasi dalam kegiatan.	Sangat tidak puas	-	-
		Tidak puas	-	-
		Netral	-	-
		Puas	7	31,82
		Sangat puas	15	68,18
Total			22	100

No.	Aspek Yang Dievaluasi	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persen
09.	Ketersediaan alat dan bahan yang diperlukan.	Sangat tidak puas	-	-
		Tidak puas	-	-
		Netral	2	9,09
		Puas	7	31,82
		Sangat puas	13	59,09
Total			22	100

No.	Aspek Yang Dievaluasi	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persen
10.	Relevansi kegiatan dengan tujuan program.	Sangat tidak puas	-	-
		Tidak puas	-	-
		Netral	-	-
		Puas	2	9,09
		Sangat puas	20	90,91
Total			22	100

No.	Aspek Yang Dievaluasi	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persen
11.	Pengetahuan baru yang diperoleh dari program.	Sangat tidak puas	-	-
		Tidak puas	-	-
		Netral	-	-
		Puas	7	31,82
		Sangat puas	15	68,18
Total			22	100

No.	Aspek Yang Dievaluasi	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persen
12.	Peningkatan keterampilan setelah mengikuti program.	Sangat tidak puas	-	-
		Tidak puas	-	-
		Netral	1	4,55
		Puas	11	50
		Sangat puas	10	45,45
Total			22	100

No.	Aspek Yang Dievaluasi	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persen
13.	Penerapan hasil program dalam kehidupan sehari-hari.	Sangat tidak puas	-	-
		Tidak puas	-	-
		Netral	-	-
		Puas	11	50
		Sangat puas	11	50
Total			22	100

No.	Aspek Yang Dievaluasi	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persen
14.	Manfaat program bagi masyarakat.	Sangat tidak puas	-	-
		Tidak puas	-	-
		Netral	-	-
		Puas	8	36,36
		Sangat puas	14	63,64
Total			22	100

No.	Aspek Yang Dievaluasi	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persen
15.	Keberlanjutan dampak program.	Sangat tidak puas	-	-
		Tidak puas	-	-
		Netral	-	-
		Puas	9	40,91
		Sangat puas	13	59,09
Total			22	100

No.	Aspek Yang Dievaluasi	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persen
16.	Kepuasan keseluruhan terhadap program.	Sangat tidak puas	-	-
		Tidak puas	-	-
		Netral	-	-
		Puas	9	40,91
		Sangat puas	13	59,09
Total			22	100

No.	Aspek Yang Dievaluasi	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persen
17.	Keinginan untuk mengikuti program serupa di masa depan.	Sangat tidak puas	-	-
		Tidak puas	-	-
		Netral	-	-
		Puas	9	40,91
		Sangat puas	13	59,09
Total			22	100

No.	Aspek Yang Dievaluasi	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persen
18.	Kesediaan merekomendasikan program kepada orang lain.	Sangat tidak puas	-	-
		Tidak puas	-	-
		Netral	1	4,55
		Puas	8	36,36
		Sangat puas	13	59,09
Total			22	100

Hasil tanya jawab dan wawancara pun menggambarkan hal serupa. Para peserta menilai bahwa narasumber sangat kompeten dalam bidangnya dan penyajiannya pun dapat dipahami. Itu sebabnya para peserta merasa banyak pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari kegiatan ini, dan mereka berkomitmen untuk menerapkan pengetahuan dan pengalamannya dalam program dan kegiatan di sekolahnya masing-masing. Selain itu mereka pun berharap hendaknya panitia berkenan menanggapi apabila di kemudian hari peserta ingin konsultasi dan mendalami materi yang disajikan, serta menerapkan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penguatan peran warga sekolah sangat penting bagi diraihnya predikat Sekolah Adiwiyata yang akan diupayakan di masa mendatang oleh sekolah sekolah khususnya tingkat Sekolah Dasar di Wilayah Binaan IV Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Sebab tiga tahapan dalam implementasi (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, semuanya mensyaratkan keterlibatan warga sekolah secara aktif. Adanya program pemerintah agar satuan pendidikan melaksanakan gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah perlu didukung dan diimplementasikan oleh satuan

pendidikan (sekolah), sehingga dapat menjadi solusi terhadap permasalahan lingkungan sekaligus bagi terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, asri, dan nyaman. Dengan demikian lingkungan sekolah sangat kondusif untuk proses pembelajaran yang berkualitas dan memberikan harapan bagi tercapainya hasil pembelajaran yang juga berkualitas.

5.2 Saran

Sebagaimana diharapkan para peserta, disarankan kegiatan ini hendaknya disebarluaskan pada sekolah-sekolah lain yang belum memperolehnya, serta ditindaklanjuti baik berupa konsultasi dan pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwipasari, L. (2016). Desain Model Akselerasi Manajemen Sampah Sekolah Dasar sebagai Upaya Pembentukan Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(2), 57.
- Iswari, R. D., & Utomo, S. W. (2017). Evaluasi Penerapan Program Adiwiyata untuk Membentuk Perilaku Peduli Lingkungan di Kalangan Siswa (Kasus: SMA Negeri 9 Tangerang Selatan dan MA Negeri 1 Serpong). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 36.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata. (t.thn.).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.* (t.thn.).
- Silaban, S. J. (2017). Implementasi Program Adiwiyata (Studi pada SMP Negeri 20 Pekanbaru). *Jom FISIP*, 4(2), 2.